

NASKAH PUBLIKASI

**PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA
TENGAH DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2018**

Oleh:

Ghausthauf Anas Mahendra
20150520142

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Bambang Eka Cahya W, S. IP., M.Si.
NIK: 19691214199409163029

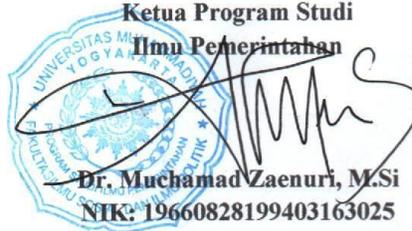
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



Dr. Fida Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

TINGKAT PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2018

Ghausthauf Anas Mahendra
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ghausthaufanas@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah salah satu bentuk proses berdemokrasi di sebuah negara demokrasi. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah diikuti oleh dua calon gubernur dan wakil gubernur. Calon nomor urut satu yaitu Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. Kemudian untuk calon nomor urut kedua adalah Sudirman Said dan Ida Fauziah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang dijadikan sebagai penulis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan atau wawancara yang dilakukan penulis langsung terjun ke lapangan. Kemudian data yang berikutnya yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan data pemilih yang diperoleh dari KPU Kabupaten Blora serta kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggabungkan data, reduksi data, dan kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah perbedaan kepentingan calon. Kemudian masyarakat tidak begitu mengenal calon gubernur dan wakil gubernur. Faktor berikutnya adalah struktur sosial masyarakat di tingkat pedesaan juga menentang minat masyarakat untuk datang ke TPS. Pekerjaan masyarakat yang melibatkan petani dan pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung, di Kabupaten Blora sedang masa panen sehingga para petani lebih memilih untuk memanen hasil pertanian mereka. Organisasi politik masyarakat sangat menentang pendidikan politik karena dalam organisasi politik, sosial, dan organisasi masyarakat lainnya menjadi pendukung terhadap kualitas individu atau kelompok. Anggota masyarakat yang berpengalaman dalam berorganisasi tentu memiliki pendidikan politik yang baik.

Kata kunci: partisipasi politik, pemilihan gubernur, golput

I. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat merupakan dasar pelaksanaan demokrasi sesuai dengan cita-cita negara demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Sehingga prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat merupakan kesatuan penting dalam rangka pembangunan tak terkecuali pembangunan di setiap daerah. Partisipasi politik juga merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap

legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih.

Partisipasi politik rakyat tentu tidak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah kali ini, hanya ada dua pasangan yang akan bersaing memperebutkan kursi gubernur dan wakilnya. Dua tokoh yang berkompetisi sebagai calon pemimpin Jawa Tengah bukanlah wajah baru di panggung politik Ganjar Pranowo kembali maju pada Pemilihan Gubernur periode ini. Sebagai calon petahana, Ganjar dipasangkan dengan Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin anak dari pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, KH Maimun Zubair. Pasangan Ganjar Yasin maju dengan dukungan PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Demokrat, PPP, dan Golkar. Lawannya, Sudirman Said, mantan Menteri ESDM 2014-2016, didampingi Ida Fauziyah yang merupakan anggota DPR dari PKB. Pasangan ini diusung oleh koalisi Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

Tabel 1 : partisipasi pemilih gubernur dan wakil gubernur di kabupaten blora tahun 2018

NO	KECAMATAN	DPT	HASIL PUNGUTAN SUARA (PILGUB 2018)		
			PEMILIH	PROSENTAS PEMILIH	PROSENTAS GOLPUT
1	BLORA	71264	47605	67%	33%
2	JEPON	49004	31810	65%	35%
3	BOGOREJO	20093	12848	64%	36%
4	BANJAREJO	47.670	28.112	59%	41%
5	TUNJUNGAN	36884	21940	59%	41%
6	CEPU	56868	37.692	66%	34%
7	JKEN	31.117	18.552	60%	40%
8	SAMBONG	22481	14064	63%	37%
9	KEDUNGTUBAN	45316	25681	57%	43%
10	RANDUBLATUN G	59330	38285	65%	35%
11	KRADENAN	32417	20674	64%	36%
12	JATI	39851	27751	70%	30%
13	NGAWEN	47615	28438	60%	40%
14	KUNDURAN	52185	32708	63%	37%
15	TODANAN	50473	30870	61%	39%
16	JAPAH	28255	17162	61%	39%
JUMLA H		69082 3	434192	63%	37%

Sumber: KPU Blora

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih untuk golput masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam pemilihan umum khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur cukup rendah.

Tabel 2 : partisipasi pemilih bupati dan wakil bupati Blora tahun 2015

NO	KECAMATAN	DPT	HASIL PUNGUTAN SUARA (PILKADA 2015)		
			PEMILIH	PROSENTAS PEMILIH	PROSENTAS GOLPUT
1	BLORA	72.836	53.537	74%	26%
2	JEPON	49.236	37.172	75%	25%
3	BOGOREJO	20.397	15.351	75%	25%
4	BANJAREJO	48.562	34.885	72%	28%
5	TUNJUNGAN	37.125	28.026	75%	25%
6	CEPU	59.424	41.224	69%	31%
7	JKEN	31.208	22.212	71%	29%
8	SAMBONG	23.965	15.801	66%	34%
9	KEDUNGTUBAN	46.253	32.669	71%	29%
10	RANDUBLATUN G	63.365	43.035	68%	32%
11	KRADENAN	33.274	23.432	70%	30%
12	JATI	41.008	28.220	69%	31%
13	NGAWEN	48.001	33.534	70%	30%
14	KUNDURAN	53.087	38.010	72%	28%
15	TODANAN	51.428	37.456	73%	27%
16	JAPAH	28.335	21.044	74%	26%
JUMLA H		706.60 4	505.842	72%	28%

Sumber: KPU Blora

Dari kedua tabel di atas, angka pemilih pada pemilihan gubernur jauh lebih sedikit dibandingkan pemilih pada pemilihan bupati. Pada pemilihan bupati tahun 2015 silam, masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya jauh lebih banyak. Perilaku pemilih dalam kaitannya dengan keikutsertaan negara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur merupakan serangkaian kegiatan dalam membuat keputusan.

Data dari tabel 1 dan tabel 2 memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu masih rendah. Angka golput dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Blora mencapai 37%, dan angka golput pada saat pemilihan kepala daerah dalam hal ini yaitu bupati tingkat pemilih yang golput hanya sebesar 28%. Hal ini tentunya menjadi masalah dalam konteks pemilu karena masyarakat enggan untuk datang ke TPS dan memilih untuk golput. Dari perbandingan data diatas, pemilih pada pemilihan bupati pada tahun 2015 jauh lebih tinggi dibanding dengan pemilihan gubernur. Hal ini menjadi perhatian yang menarik bagi penulis untuk mengetahui penyebab masih banyaknya pemilih yang golput di pilgub tahun 2018.

II. Tinjauan Pustaka

PARTISIPASI POLITIK

a. Pengertian Partisipasi Politik

Yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah suatu masyarakat yang ikut serta dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Menurut Merian Budiarjo, mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang melibatkan sekelompok orang untuk ikut secara aktif kehidupan berpolitik.

BUDAYA POLITIK

Budaya politik menurut Gabriel Almond dan Verba adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang didalamnya terdapat sikap dan orientasi politik didalam suatu sistem politik. Almond dan Verba membagi budaya politik menjadi 3 komponen:

1. Komponen Kognitif, yaitu tingkat kemampuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap suatu sistem politik, seperti tokoh politik, kebijakan, dan simbol-simbol yang berhubungan dengan sistem politik.
2. Komponen Afektif, yaitu terkait dengan perasaan warga negara yang nantinya dapat membuat warga negara tersebut dapat percaya dengan sistem politik tersebut.
3. Komponen Evaluatif, yaitu perasaan yang muncul dari masyarakat terhadap kepuasan objek politik.

Ada beberapa tipologi kebudayaan politik yang bersifat murni, maka dapat dibedakan tiga bentuk kebudayaan politik:

1. Kebudayaan Subyek-Parokial

Kebudayaan subyek parokial adalah bentuk dari kebudayaan politik yang menjelaskan bahwa masyarakat desa ataupun penduduk di suatu wilayah dan secara turun temurun memilih untuk mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik.

2. Kebudayaan Partisipan-Subyektik

Kebudayaan partisipan-subyektik ini merupakan sebuah bentuk peralihan dari kebudayaan yang dianggap parokial menuju ke bentuk partisipan.

3. Kebudayaan Parokial-Partisipan

Masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di belahan dunia yang sedang berkembang. Dalam negara yang berkembang, masyarakat lebih banyak memilih untuk menganut budaya parokial yang rata-rata sangat dominan di dalam sebuah negara.

PEMILU

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Dasim Budiman Syah mendefinisikan Pemilu sebagai suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Sedangkan Paimin Napitupala memberikan pengertian pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan inspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah. Lebih jauh diuraikan oleh beliau bahwa pemilu adalah sebagai suatu sistem dan proses bekerja struktur dan fungsi elemen atau sub sistem elektoral laws dan elektoral progress menuju terciptanya suatu representative government dan democratize government yang melibatkan berbagai organisasi

dan pranata baik dari infra struktur pemerintahan maupun dalam supra struktur pemerintahan, mutlak membutuhkan suatu kemampuan dalam menyelesaikan proses konvensi input menjadi output yang mendatangkan outcome tertentu bagi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dedi Mulyadi memberikan pengertian mengenai Pemilu yaitu sebuah mekanisme politik modern untuk menginternalisasikan aspirasi, espektisi dan kepercayaan (truss) masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya di lembaga legislatif maupun eksekutif (pusat dan daerah) secara langsung.

Adapun fungsi pokok dari Pemilu adalah:

a. Fungsi keterwakilan (representative ness) yaitu di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perwakilan dan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskripsi wilayah.

b. Fungsi integrasi, yaitu berarti adanya partai yang menerima partai lain dan masyarakat juga menerima partai tersebut.

c. Fungsi mayoritas, memiliki cakupan yang sangat besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (govern ability).

Di lain pihak Pamlian menyatakan ada 4 fungsi dari pemilihan umum yaitu,

a. Pembentukan atau pemupukan kekuatan yang absah,

b. Mencapai tingkat ketaqwaan politik,

c. Pembudayaan politik,

d. Pelembagaan politik.

Di samping ke empat fungsi di atas menurut J. Krisnadi dapat ditambahkan 2 fungsi lagi yaitu: fungsi pengendalian konflik dan pendewasaan politik.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum menurut Arbi Samit adalah: pertama, melaksanakan kedaulatan rakyat yang menjamin kepentingan semua golongan, kedua, menentukan wakil rakyat yang sekaligus harus melayani penguasa dan rakyat secara seimbang, ketiga, membentuk pemerintahan perwakilan lewat OPP pemenang (tunggal atau oposisi), keempat, penggantian atau pengakaran elit penguasa; kelima, pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi dalam pemilihan umum.

3. Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pemilihan dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum sebanyak lima tahun sekali. Pemilihan ini mencakup banyak hal, diantaranya yaitu dengan perencanaan program dalam proses pemilu itu sendiri. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu ikut andil secara penuh dalam proses pemilu.

Di dalam negeri pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Sedangkan pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud di atas.

5. Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Umum

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemilu, untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

PATRONASE

Patronase adalah salah bentuk yang timbul akibat adanya perjanjian politik yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan pembagian keuntungan antara politisi dan para pegiat kampanye yang dalam proses kampanye calon tersebut mendapatkan banyak dukungan dari beberapa pihak, sehingga secara tidak langsung pembagian keuntungan itu harus ada.

KLIENTALISME

Klientalisme tidak sama dengan patronase, hal ini dikarenakan dalam penertian klientalisme secara harfiah memiliki arti bahwa seseorang tersebut merupakan pengikut yang cukup setia terhadap suatu calon tertentu.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian berupa penelitian kualitatif, yang artinya dengan menganalisis tingkat partisipasi politik

masyarakat yang kemudian akan diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan risetnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Blora.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui data sebelumnya, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian

IV. Pembahasan

1. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN BLORA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.

Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri. Artinya bahwa rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Tabel 1

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	BLORA	19.299	26%	23659	33%
2	JEPON	12.064	25%	17194	35%
3	BOGOREJO	5.046	25%	7245	36%
4	BANJAREJO	13.677	28%	19558	41%

Dari penjelasan tabel diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Blora, secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih rendah dibandingkan pemilihan bupati pada tahun 2015. Di kecamatan Blora sendiri, jumlah angka golput pada pilkada sebesar 19.299 dan pada pemilihan gubernur masyarakat yang memilih golput mencapai 23.659 suara. Di kecamatan Jepon, angka golput pilkada tahun 2015 mencapai 12.064 dan pada saat pemilihan gubernur angka golput jauh lebih tinggi yaitu sebanyak 17.194 suara. Kecamatan Bogorejo angka golput pada saat pilkada sebanyak 5.046 suara, dan pada saat pilgub angka golput juga masih tinggi yaitu sebesar 7245 suara. Kecamatan banjarejo memiliki perbedaan yang sangat besar dimana pada saat pilkada angka golput sebesar 13.667 dan pada saat pilgub mencapai 19.558.

Tabel 2

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	TUNJUNGAN	9.099	25%	14944	41%
2	CEPU	18.200	31%	19176	34%
3	JKEN	8.996	29%	12565	40%
4	SAMBONG	8.164	34%	8417	37%

Perbandingan jumlah suara yang tidak digunakan di kecamatan tunjungan pada saat pilkada dan pilgub sangat signifikan. Pada saat pilkada angka golput mencapai 9.099 suara dan pada saat pilkada mencapai 14.944 suara. Di kecamatan cepu, jumlah suara yang golput pada

saat pilkada yaitu sebesar 18.200 dan pada saat pilgub sebesar 19.176 suara. Di kecamatan jiken juga terdapat selisih yang cukup banyak, yaitu pada saat pilkada berjumlah 8.996 suara sedangkan pada saat pilgub mencapai 12.565 suara. Di kecamatan sambong jumlah pemilih yang memilih untuk golput tidak begitu besar, yaitu 8164 suara pada saat pilkada dan 8417 suara pada saat pilgub.

Tabel 3

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	KEDUNGTUBAN	13.584	29%	19635	43%
2	RANDUBLATUNG	20.330	32%	21045	35%
3	KRADENAN	9.842	30%	11743	36%
4	JATI	12.788	31%	12100	30%

Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, angka golput di kecamatan kedungtuban sebesar 13.584 suara dan pada saat pilgub mencapai 19.635. kemudian kecamatan randublating jumlah suara yang tidak dicoblos saat pilkada sebesar 20.330 dan jumlah golput pada saat pilgub mencapai 21045 suara. Untuk kecamatan kradenan juga tidak jauh berbeda dengan kecamatan lain, golput pada saat pilkada yaitu sebesar 9.842 suara dan pada saat pilgub mencapai 11.743 suara. Akan tetapi di kecamatan jati ada sedikit hal yang berbeda, dimana jumlah golput saat pilgub tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan pilkada tahun 2015.

Tabel 4

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	NGAWEN	14.467	30%	19177	40%
2	KUNDURAN	15.077	28%	19477	37%
3	TODANAN	13.972	27%	19603	39%
4	JAPAH	7.291	26%	11093	39%

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kecamatan Ngawen masih lebih baik jika dibandingkan dengan pemilihan gubernur di tahun 2018. Dimana pada saat pilkada angka golput sebesar 14.467 dan pada pilgub mencapai 19.117 suara. Kecamatan Kunduran juga tidak jauh berbeda dengan kecamatan lainnya, yaitu pemilih yang memilih golput pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih besar dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Jumlah pemilih di Kecamatan Todanan pada saat pemilihan bupati juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pemilih di pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2018. Kemudian untuk kecamatan Japah, terdapat jarak yang begitu besar antara jumlah pemilih yang golput, dimana pemilih yang golput di pemilihan gubernur jauh lebih besar yakni sebesar 11.093 suara.

Pemilu demi pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang nantinya diharapkan untuk dapat merubah kehidupan agar menjadi lebih baik. Begitu pula dengan pemilihan gubernur, masyarakat sangat mengharap adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu dengan ikut memilih seorang pemimpin dengan cara pemilihan umum.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh ketua KPU Kabupaten Kabupaten Blora, Muhammad Hamdun, bahwasanya banyaknya pekerja yang asalnya dari Blora kemudian merantau dan tidak kembali ke kampung halaman untuk melakukan pencoblosan. Masyarakat lebih memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang datang ke TPS. Masyarakat yang penulis wawancara juga menuturkan bahwa banyak saudara dari responden yang keluar kota untuk bekerja dan tidak kembali, dan rata-rata orang yang merantau akan pulang pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha.

Pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Tengah menurut beberapa responden juga tidak tepat. Hal ini terjadi karena di daerah kecamatan Kradenan dan kecamatan Kedungtuban pada bulan Juni tahun 2018 sedang dalam masa panen raya dan masyarakat tidak datang ke TPS dan lebih memilih pergi ke sawah untuk memanen hasil pertanian mereka. Kemudian banyak juga yang mengemukakan bahwa masyarakat tidak mengenal calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Responden juga menuturkan bahwa dari pilgub ke pilgub yang dirasakan juga sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

Pendidikan politik masyarakat juga masih tergolong cukup rendah, karena masyarakat blora sebagian besar bekerja sebagai petani. Dalam hal ini, KPU sebagai lembaga yang secara langsung bergerak sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik.

Keikutsertaan dan pengalaman masyarakat di pedesaan dalam berorganisasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018. Orang yang berpengalaman dalam organisasi kemasyarakatan, keagamaan, hingga politik pasti memiliki kesadaran bahwa suara mereka sangat berguna untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa satu suara mereka sangat berguna untuk proses demokrasi dan dapat melakukan perubahan, maka sistem demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik dan uang yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pemilu tidak terbuang dengan percuma.

2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PANDANGAN TERHADAP OBYEK POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang atau masyarakat terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik dan terbiasa dalam organisasi, lebih cenderung untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Meskipun pemilu bukan merupakan pemilu yang wajib, melainkan pemilu hak setiap individu, akan tetapi apabila seseorang atau anggota masyarakat yang memiliki pengalaman yang lebih, maka ia akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dalam proses pemungutan suara seperti pada pemilihan gubernur ini, satu suara pun sangat berarti untuk melakukan perubahan, baik itu perubahan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, maupun yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.

Percaturan politik di Indonesia mulai dari zaman revolusi, reformasi, hingga orde baru banyak meninggalkan cerita yang mungkin banyak dirasakan oleh warga negara Indonesia. Pemilu demi pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang nantinya diharapkan untuk dapat merubah kehidupan agar menjadi lebih baik. Begitu pula dengan pemilihan gubernur, masyarakat sangat mengharap adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu dengan ikut memilih seorang pemimpin dengan cara pemilihan umum. Dengan ikut memilih, otomatis masyarakat ikut andil dalam melakukan perubahan dan secara tidak langsung ikut dalam proses pembangunan.

3. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN UMUM.

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Dasim Budiman Syah mendefinisikan Pemilu sebagai suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Sedangkan Paimin Napitupala memberikan pengertian pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan inspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah. Lebih jauh diuraikan oleh beliau bahwa pemilu adalah sebagai suatu sistem dan proses bekerja struktur dan fungsi elemen atau sub sistem elektoral laws dan elektoral progress menuju terciptanya suatu representative government dan democratize government yang melibatkan berbagai organisasi dan pranata baik dari infra struktur pemerintahan maupun dalam supra struktur pemerintahan, mutlak membutuhkan suatu kemampuan dalam menyelesaikan proses konvensi input menjadi output yang mendatangkan outcome tertentu bagi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dari pendapat yang dijabarkan oleh ketua KPU, dari proses sosialisasi KPU sudah melakukannya dengan baik. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU, PPK, maupun PPS. PPK merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan, dan kinerjanya diawasi oleh panwascam, kemudian PPS merupakan lembaga yang melakukan tugas untuk melakukan pemilihan di tingkat desa. Tidak hanya melakukan proses pemilihan, akan tetapi PPK dan PPS juga ikut andil dalam proses sosialisasi.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan warga di kecamatan Tunjungan, para responden berpendapat bahwa benar PPK dan PPS sudah melakukan sosialisasi di wilayah mereka masing-masing. Sosialisasi yang dilakukan PPS menyasar anggota masyarakat yang sedang melakukan kegiatan seperti arisan ibu-ibu PKK, ataupun pengajian yang dilakukan oleh bapak-bapak.

Di setiap kecamatan, hiburan dan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga beragam. Untuk daerah Cepu, dalam rangka sosialisasi yang bertujuan untuk menjangkau partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS yaitu dengan diadakannya pentas wayang kulit semalam suntuk. Dalam wayangan ini, sosialisasi diadakan langsung oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk kecamatan Kradenan, sosialisasi dilakukan dengan cara hiburan rakyat berupa orgen tunggal. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh PPK kecamatan Kradenan dan diadakan di depan kantor kecamatan Kradenan.

4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN TIMBAL BALIK POLITIK

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Isu money politik memang selalu menjadi hal sangat menarik saat menjelang dan setelah terjadinya pemilihan umum, pilkada, pileg, maupun pilgub. Masyarakat masih beranggapan bahwa yang memberikan uang maka itulah yang bersungguh-sungguh untuk menjadi kepala di pemerintahan. Padahal yang terjadi sebenarnya apabila calon memberikan uang, maka tanggung jawab calon yang terpilih nantinya sudah selesai, karena suara mereka sudah dibeli oleh calon tersebut.

Pada saat penulis melakukan penelitian dan terjun di lapangan, penulis menemukan banyak asumsi bahwa masyarakat akan memilih jika mereka diberikan uang. Sosialisasi dari KPU, Parpol, dan media massa lainnya seperti tidak ada gunanya apabila suara masyarakat masih ditentukan oleh money politik. Kesadaran politik masyarakat harus secara sadar terbentuk dari diri pribadi masing-masing dan harus memiliki tanggung jawab sendiri terhadap suara yang diberikan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dikutip dari Tempo.co, pada hari senin tanggal 19 Februari 2018, calon gubernur Sudirman Said melakukan lawatan ke Kecamatan Cepu untuk melakukan proses kampanye. Dalam kampanye nya, Sudirman lebih memilih untuk bertemu dengan petani dan sedikit menyinggung soal kartu tani. Kemudian, pada tanggal 04 April, calon gubernur Ganjar Pranowo juga melakukan lawatannya ke kabupatennya, lebih tepatnya di kecamatan Blora. Dalam lawatannya, Ganjar lebih berfokus pada pedagang tumpah di pasar blora dan petani tembakau. Dari kunjungan kedua calon gubernur tersebut, di kecamatan cepu angka pemilih cukup besar mencapai 66%, dan di kecamatan Blora mencapai 67%. Dengan kata lain, dengan kedatangan calon gubernur, para masyarakat lebih antusias untuk datang dan berpartisipasi dibandingkan dengan daerah yang tidak di datangi oleh calon gubernur.

Golput bisa dilihat dari berbagai segi karena cakupannya yang cukup luas, Pertama golput teknis yakni mereka yang karena sebab sebab teknis tertentu menjadi golput. Misalnya karena sakit parah dan tidak bisa memilih. Kedua, golput teknis politis yakni golput karena kesalahan teknis dari KPU atau diri sendiri. Ketiga, Golput politis yakni mereka yang merasa tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan atau perbaikan. Keempat, golput ideologis yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama maupun alasan politis ideologis lainnya.

5. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RELASI POLITIK

“Dalam Pilgub tahun 2018, tingkat apatisme masyarakat selalu tinggi, pemilu ke pemilu, masyarakat melontarkan tidak ada perubahan sehingga masyarakat tdk mau datang ke tps sehingga ini menjadi hambatan dalam pilgub” wawancara oleh Pak Hamdun, ketua KPU Blora.

Dalam hubungannya dalam relasi politik, masyarakat lebih menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Basis suara masyarakat berada pada lingkungan terendah, seperti RT dan RW, sehingga calon gubernur dan wakil gubernur tidak dapat menjangkau secara langsung para masyarakat, sehingga relasi secara langsung tidak dapat terjalin. Yang ditunggu oleh masyarakat hanyalah janji politik yang harus dilakukan melalui visi dan misi gubernur yang telah terpilih

V. Kesimpulan Dan Saran

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa : faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu perbedaan kepentingan calon. Kemudian masyarakat tidak begitu mengenal calon gubernur dan wakil gubernur. Faktor berikutnya yaitu struktur sosial masyarakat khususnya di tingkat pedesaan juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk datang ke tps. Pekerjaan masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung, di kabupaten blora sedang masa panen sehingga para petani mayoritas lebih memilih untuk memanen hasil pertanian mereka. Organisasi politik masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan politik karena dalam organisasi politik, sosial, dan organisasi masyarakat lainnya tentu menjadi pendukung terhadap kualitas individu maupun kelompok. Anggota masyarakat yang berpengalaman dalam berorganisasi tentu memiliki pendidikan politik yang baik.

Pendidikan politik masyarakat khususnya di pedesaan sangat rendah, sehingga kesadaran politik juga rendah. Organisasi politik masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan politik karena dalam organisasi politik, sosial, dan organisasi masyarakat lainnya tentu menjadi pendukung terhadap kualitas individu maupun kelompok. Anggota masyarakat yang berpengalaman dalam berorganisasi tentu memiliki pendidikan politik yang baik.

Kemudian faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap objek politik adalah sikap politik calon gubernur dan wakil gubernur. Kepercayaan politik masyarakat terhadap calon sangat mempengaruhi, dan adanya hubungan timbal balik politik. Dalam hal ini masyarakat masih beranggapan bahwa calon yang memberikan uang (money politik) itulah nantinya yang akan dipilih oleh mereka.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak antara lain:

1. Kepada KPU

Terkait pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU sebagai penyelenggara sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga dinilai cukup baik karena pada tahun 2018 ini, sosialisasi sudah dilaksanakan dengan maksimal. Saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini adalah KPU seyogyanya melaksanakan sosialisasi secara lebih maksimal lagi sehingga masyarakat dapat mengetahui dan nantinya masyarakat memiliki kesadaran untuk datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan baik itu pemilihan Presiden dan wakil presiden, DPR/DPRD, DPD, Gubernur, maupun pilkada di tingkat kabupaten.

2. Kepada Masyarakat

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebaiknya masyarakat lebih mengetahui arti penting pemilu, karena hal pemilu adalah memilih wakilnya sendiri dan masyarakat seyogyanya sadar bahwa satu suara mereka sangat berharga untuk proses demokrasi.

3. Kepada pada peneliti berikutnya

Agar peneliti berikutnya dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sehingga masyarakat di tingkat bawah juga sadar akan pentingnya suara mereka di proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Almond, Gabriel A. Dan Sydney Verba. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes And Democracy In Five Nation*. Princeton University press: Princeton
- Marijan, Kacung, (2003). *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. Eurika. Surabaya
- Marijan, Kacung, (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Prenada media. Jakarta
- RPJMD Kabupaten Blora 2016-2021

Jurnal

- Akbar, M. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa* s k r i p s i.
- Andriyus. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, 2(September).
- Arianto, B. (2011). *Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu*, 1(1), 51–60.
- Darumurti, A., & Sulaksono. (2014). *Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul*.
- Hendrik, D. (2008). *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*, 137–148.
- Muslimat, A. (2008). *Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik Ade Muslimat Universitas Serang Raya; Pusat Studi Wanita Provinsi Banten*, 17–30.
- Nurhayati, S. (2011). *Partisipasi politik masyarakat sedulur sikep desa karangrowo kecamatan undaan kabupaten kodus* skripsi.
- Octavia, G. (2015). *Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013*, 2(1), 1–14.
- Santi Lusiani, W. & M. M. (2017). *Partisipasi Politik Pada Penduduk Sirkuler Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013*, 2(1).

Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, 2(2), 166–175.

Tyesta, L. (2019). Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)

Data Internet

<https://pilkada.tempo.co/read/1063143/di-blora-sudirman-said-sebut-kartu-tani-itu-malah-bikin-susah/full&view=ok>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3953819/begini-janji-ganjar-agar-pasar-di-blora-tak-lagi-tumpah-ke-jalan>